



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DANA ABADI PENDIDIKAN UNTUK MERINGANKAN BIAYA KULIAH

Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Muda
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) terus menjadi perhatian. Seiring meningkatnya jumlah PTN yang memiliki status badan hukum atau PTN-BH serta penerapan seleksi masuk jalur mandiri, biaya kuliah di PTN dinilai semakin memberatkan. Meskipun terdapat mekanisme pengajuan keringanan dan penyesuaian biaya kuliah berdasarkan kemampuan ekonomi, besarnya biaya kuliah terus meningkat.

Biaya kuliah yang tinggi memberikan peluang bagi munculnya opsi pembiayaan alternatif melalui platform pinjaman pendidikan daring (pindar) yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Platform pindar ini dapat membantu membayar biaya kuliah, sementara mahasiswa dapat melakukan pembayaran secara mencicil kepada platform tersebut.

Sejak pekan lalu, keluhan mahasiswa ITB yang mengalami kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT) viral di media sosial. UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dari jumlah 1.800 mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT, hanya 308 mahasiswa (17%) yang mendapatkan persetujuan dari pihak rektorat. Sebanyak 120 mahasiswa ITB tidak dapat mengisi formulir rencana studi (FRS) karena masih memiliki tunggakan pembayaran UKT. Sebagai solusi, ITB menawarkan opsi pembayaran melalui pindar dengan menggunakan platform Danacita. Kebijakan Rektorat ITB ini mendapat banyak kritikan, termasuk dari OJK, meskipun Danacita ternyata sudah terdaftar secara resmi dan memiliki kerja sama dengan 43 perguruan tinggi sejak dua tahun yang lalu.

OJK menyayangkan tingkat bunga pindar Danacita yang mencapai 1,75% dengan biaya persetujuan 3%, sementara OJK telah menetapkan batas maksimal bunga pinjol sebesar 0,3%. Sebuah simulasi di ITB menunjukkan bahwa jika seorang mahasiswa meminjam melalui pindar Danacita, dia akan dihadapkan pada penawaran pinjaman sebesar Rp12,5 juta dengan pembayaran sebesar Rp15,5 juta selama 12 bulan. Alternatif lainnya adalah mahasiswa dapat memilih opsi cuti yang tidak memerlukan pembayaran UKT.

Menanggapi isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana pemerintah memberikan pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi pendidikan (DAP) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini, Dewan Pengawas LPDP sedang menyiapkan bantuan pinjaman biaya pendidikan bunga rendah untuk mahasiswa (*student loan*), sehingga bisa digunakan untuk membayar UKT. Saat ini, skema beserta aturan *student loan* tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Student loan menarget para mahasiswa yang mengalami kesulitan secara ekonomi untuk membayar uang kuliah. Sumber dana akan dialokasikan dari dana abadi yang tersedia pada program LPDP yang saat ini mencapai Rp134,1 triliun. Meski tetap ada beban bunga, Sri Mulyani berpendapat bahwa alternatif tersebut sangat diperlukan untuk membuka akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang lebih terjangkau, sehingga biaya pendidikan berbunga tidak terlalu membebani para mahasiswa.

DAP awalnya dicetuskan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2010 dan kini dikelola oleh LPDP sejak 2012. Selain DAP, pemerintah juga mengalokasikan Dana Abadi Penelitian (2019), Dana Abadi Kebudayaan (2020), dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (2020). Menurut Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2021, LPDP memiliki mandat untuk mengelola seluruh dana abadi tersebut. Akumulasi dana abadi yang semula Rp1 triliun pada 2010, kini mencapai Rp139,11 triliun per akhir 2023, dengan proyeksi mencapai Rp164 triliun hingga akhir 2024.

Pemanfaatan DAP yang dikelola oleh LPDP dikenal melalui pemberian beasiswa pendidikan LPDP, terutama untuk mendukung mahasiswa pascasarjana dalam kuliah di perguruan tinggi ternama dunia tanpa mengalami keterlambatan pembayaran. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memperluas cakupan program beasiswa LPDP untuk peningkatan kualitas dosen, guru, hingga anak didik; membiayai beragam program belajar di luar kampus bagi mahasiswa melalui Kampus Merdeka, baik di dalam maupun di luar negeri; sebagai insentif bagi PTN dalam mengembangkan kemampuan membentuk dana abadi; serta untuk mendukung pendanaan pembangunan kebudayaan berkelanjutan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendukung terobosan pemerintah untuk membantu warga yang kesulitan dengan biaya kuliah. Apalagi Indonesia tertinggal dari segi angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. DAP yang disisihkan dari alokasi 20% APBN untuk pendidikan seharusnya tidak diwacanakan untuk dihentikan. Justru, pemanfaatannya bisa untuk solusi pendanaan pendidikan, salah satunya untuk pendidikan tinggi. Komisi X DPR RI perlu mendorong pemanfaatan DAP untuk: (1) mengalokasikan sebagian dana untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan, baik seluruh atau sebagian biaya kuliah, biaya hidup, dan kebutuhan pendidikan lainnya; (2) menyelenggarakan program *student loan* dengan mematangkan skema dan aturannya guna memastikan bahwa program tersebut efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa tanpa menimbulkan beban finansial yang tidak wajar; (3) mendorong pengembangan program pendidikan berkelanjutan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan untuk mendukung riset dan pengembangan dalam bidang-bidang yang relevan; dan (4) membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan skala DAP. Kerja sama ini dapat melibatkan sumbangan, investasi, atau program kemitraan publik-swasta yang mendukung pendidikan tinggi.

Sumber

inilah.com, 30 & 31 Januari 2024;
kemenkeu.go.id, 1 Februari 2024;
kompas.id, 30 Januari & 1 Februari 2024;
medcom.id, 31 Januari 2024; dan
pilar.id, 3 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.